

BAB III

PARTAI NAHLATUL ULAMA MENJELANG LAHIRNYA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Suatu kenyataan telah terjadi bahwa kelompok umat Islam yang menamakan dirinya sebagai golongan "Ahli Sunnah Waljema'ah" yang artinya golongan yang mengikuti jejak langkah Nabi dan para shahabatnya, telah mendirikan organisasi yang kemudian berubah menjadi partai politik dengan nama "Nahdlatul Ulama". Nahdlatul Ulama yang acapkali disingkat dengan NU itu, mempunyai arti "kebangkitan ulama". Maka di dalam bab ini akan diuraikan:

1. Nahdlatul Ulama sebagai partai politik,

2. Aktifitas politiknya.

3. Situasi hubungan part

yang lain.

A. REAGENTS FOR OXIDATIVE PROTEIN PURIFICATION

Nahdlatul Ulama sejak tanggal 1 Mei 1952 sesuai dengan keputusan muktamaranya di Palembang menjelma menjadi partai politik yang mandiri¹, yang sebelumnya ia menjadi bagian dari partai politik Masyumi yang didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945². Keputusan ini akan membawa konsekuensi yang tidak kecil. Konsekwensi itu tidak hanya menyangkut tata organisasi, tetapi juga akan menyangkut sebagian umat Islam. Pengaruh intern (seperti adanya perubahan AD/ART) menghancurkan Nahdlatul Ulama harus mampu menentukan suatu langkah politik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan pengaruhnya pada sebagian umat Islam ini dimaksud-

¹Drs. M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 103.

²Maksoem Mahfudz, Kebangkitan Ulama Dan Bangkitnya Ulama, PN Kesatuan Umat, Surabaya, 1982, hal. 78.

kan adalah warga Fahdlatul Ulama harus disadarkan guna mengenali status organisasi ini, bahwa ia telah menjadi partai politik yang mandiri dan dimobilisasikan untuk bersama-sama mencapai tujuan partai.

1. Latar belakang berdirinya partai politik Nahdlatul Ulama.

Masalah politik dan organisasi yang dialami oleh Nahdlatul Ulama baik dalam wadah Masyumi maupun pengalaman perjalanan organisasinya dapat menantang atau mendewaskan Nahdlatul Ulama, artinya ia mampu beradaptasi yang seiring dengan tujuan organisasi.

Pada awalnya Masyumi merupakan satu-satunya partai politik Islam punya menyeluruh aspirasi Islam lewat jalur politik. Akhirnya di dalam tubuh Masyumi sekuarang-kurangnya terdapat dua kubu atau kelompok yang berlainan sudut pandang: (yang dimiliki oleh para personalnya). Dan akhirnya akan menimbulkan ketidak harmonisan di tubuh partai ini. Adanya dua perbedaan ini kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh perbedaan wawasan keagamaan. Di satu pihak berpendidikan formal yang menciptakan alumninya menjadi intelektual, di lain pihak berpendidikan non-formal yakni dari poncok pesantren yang menciptakan alumninya menjadi kyai atau ulama yang bersifat konservatif. Perbedaan pandangan antara kelompok intelek tuel dengan kelompok ulama atau kyai semakin lama semakin memburuk, dari masalah-masalah seperti herba kunut, ucholli sampai yang menyengkut pada status anggota organisasi, perbedaan jatah kursi dan terutama lagi tergantungnya kedudukan majlis syuro.

Dalam kepengurusan partai Nasjumi yang sempati posisi tertinggi ada di tangan majelis ayu-ro atau dewan partai. Sebagaimana yang tertul-

ang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ANT)nya bab IX pasal 30 tentang hak dan kewajiban majlis syuro sebagai berikut :

- 1.1. Majlis syuro pusat berhak mengusulkan hal-hal yang mengenai politik kepada pimpinan parti.
 - 1.2. Majlis syuro pusat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang soal-soal yang bertainian dengan pasal 2,3,4 anggaran dasar dan lain-lain yang dikemukakan oleh pimpinan parti.
 - 1.3. Dalam soal politik yang mengenai hukum agama, maka pimpinan parti meminta fatwa, dan majlis syuro pusat memberikan jawabannya dalam waktu yang dikehendaki.
 - 1.4. Putusan majlis syuro pusat adalah keputusan yang mengikat pimpinan parti.
 - 1.5. Jika muktamar / dewan parti berpendapat lain dari pada keputusan yang diambil oleh majlis syuro pusat, maka muktamar / dewan parti dapat mengirim utusannya untuk merundingkan putusan tersebut dengan majlis syuro pusat dan hasil perundingan mereka itu merupakan putusan tertinggi.³

Den kalau ditinjau dari segi historisnya, maelis ini banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh NU seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahid Hasyim dan KH. Abd. Wahab Chasbullah.

2. Alasan Nahdlatul Ulama Menjadi Partai Politik.

Partai Masyumi yang didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 dalam masalah keanggotaannya terdapat dua jenis/ kelompok keanggotaan, yaitu anggota

³Ibid. hal. 80.

biasa dan anggota istimewa. Anggota biasa adalah anggota perorangan, sedangkan anggota istimewa adalah anggota yang mewakili organisasi sosial keagamaan. Melihat hal ini Nahdlatul Ulama merupakan salah satu anggota istimewa yang ada di dalam tubuh Masyumi.

Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai Masyumi, bahwa Majlis Syuro merupakan dewan yang tertinggi. Namun setelah muktamar Masyumi yang ke IV 1949 di Yogyakarta yang diputuskan tentang perubahan AD/ART yang pada pokoknya :

2.1. Menyamakan kedudukan Majlis Syure dengan Dewan Partai.

2.2. Majlis Syuro hanya sebagai dewan penasehat,

Dari sinilah timbul ketidak puasan Nahdlatul Ulama pada Masyumi semakin lama semakin meruncing bahkan akhirnya merubah status Nahdlatul Ulama menjadi partai politik.

Adapun faktor yang menyebabkan Ulama keluar dari Masyumi :

Nahdlatul

a. Soal kedudukan majlis syuro.

Menurut Nahdlatul Ulama dualisme pimpinan di dalam partai Masyumi menyebabkan Ulama dianggap kecil perannya meskipun ulama memegang pertimbangan dewan partai, tetapi fatwa ulama hanya dianggap sebagai dewan penasehat saja. Tentunya penasehat itu tidak mempunyai hak veto dan nasehatnya sendiri tidak harus dilaksanakan.⁴

b. Masalah jatah kursi.

⁴Ibid., hal. 97-99

Yang dimaksud dengan masalah jatah kursi ini adalah Nahdlatul Ulama menuntut Masyumi sebagai formator kabinet, supaya menteri agama dicalonkan pada kelompok Nahdlatul Ulama. Ini terjadi pada waktu kabinet Wilopo (1952)⁵. Alasan itu secara rasio dapat dibenarkan; sebab kalau ditinjau dari segi kepeloporan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dalam Masyumi cukup berpotensi; misalnya: N.H. Hasyim Asy'ari (Ketua Umum), N.H. Abd. Wahab Chasbullah (anggota) dan N.H Abd. Wahid Hasyim (Ket. Muda)⁶. Kalau ditinjau dari segi kvantitas, mereca Nahdlatul Ulama cukup banyak jumlahnya; khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.⁷ Tetapi tuntutan itu tidak dihiraukan oleh Masyumi, maka Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi⁸.

c. Kedudukan orangtua dalam bersucra.

Yang dimaksud disini ialah bahwa Nahdlatul Ulama yang morasa dirinya sebagai anggota istimewa dan menduduki pos-pos penting dalam partai Nasyumi tidak mau disamakan kedudukannya dengan anggota biasa dalam memberikan suara. Hal ini harus dilakukan Nahdlatul Ulama, karena nampaknya Nasyumi menghendaki agar kedudukan dalam ber suara tersebut disamakan dengan anggota biasa atau perorangan. Tentunya 8 wakil Nahdlatul Ulama ini hanya mempunyai suara satu⁹.

3. Partai Nahdlatul Ulama Lahir.

Pada bagian lain telah disinggung tentang keadaan partai Masyumi. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan politik tidak selamanya sesuai dengan perhitungan di atas kertas. Hal ini harus diskusi oleh Nahdlatul Ulama, sebab setelah adanya pergeseran kedudukan Ulama, status

B.J. Boland, Pergaulan Islam di Indonesia, PT Grafiti
Pers, Jakarta, Cet. 1, 1995, hal. 43-50.

⁶ Maksusen Nahfudz, Op.cit., hal. 81.

⁷B.J. Boland, op.cit., hal. 57.

⁸H. Abd. Basit Adnan, Kemelut Di BPS antara Nysa dan Politisi, CV Mayasari, Solo, Et. 1, 1982, hal. 24.

9. Seifuddin Zuhri, Peranan NU dalam Pengembangan Islam dan Membela Tanah Air, NU Kodya Surebaya, 1980, hal. 135.

anggauta dan perbedaan jatah kursi, maka ini semus menampakkan perkembangan politik di dalam tubuh Masyumi mengalami perubahan-perubahan. Namun demikian dalam kondisi seperti ini Nahdlatul Ulama masih mencoba mempertahankan diri dan masih menganggap bahwa Masyumi merupakan satu-satunya wadah politik umat Islam. Sambil mengadakan perbaikan-perbaikan organisasi antara lain dengan jalan mencoba untuk mengubah Masyumi menjadi federasi, sehingga masing-masing organisasi anggotanya tidak tercampuri urusan rumah tangganya.

Agaknya usaha yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama tidak berhasil; maka di dalam muktamarnya ke 19 di Palembang diputuskan untuk memisahkan diri dari keanggotaan partai Masyumi; keputusan pengurus besar NU disampaikan dalam muktamarnya itu. Ternyata 61 suara dalam muktamar menyatakan setuju, 3 suara menoleh dan 7 suara belengko. Dengan demikian secara organisatoris Nahdlatul Ulama memisahkan diri atau keluar dari Masyumi.¹⁰

Jadi jelasnya bahwa Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 dan ikut berpolitik sejak tanggal 7 Nopember 1945, akhirnya sejak tanggal 1 Mei 1952 membentuk partai politik yang mandiri, yang bertujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar partai Nahdlatul Ulama tahun 1952 pasal 2 dan 3.

Pasal dua berbunyi :

"Untuk menegakkan syari'at Islam, dengan berhaluan selah satu dari pada 4 madzhab; Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali serta melaksanakan hukum-hukum Islam dalam masyarakat".

Pasal tiga berbunyi:

"Untuk memperjuangkan tujuan Nahdlatul Ulama di dalam badan-badan pemerintah, dewan-dewan perwakilan rakyat dan di dalam segala lembaga masyarakat".

10Maksoem Mahfudz, Cp.cit,Eal. 91.

¹¹ *Ibid.*, hal. 117-118.

Adapun dalam perjuangannya sebagai partai politik, Nahdlatul Ulama meniti karier kepolitikannya lewat dua jalur, yang pertama jalur politik praktis. Hal ini dapat dilihat betapa gigihnya partai NU dalam memperjuangkan legitimasi piagam Jakarta sebagai pembukaan dan menyelipkannya pada pasal 29 dari undang-undang dasar 1945¹² tentang agama bersama dengan partai yang lain yang berdasarkan Islam. Jalur kedua adalah jalur kultural politik. Jalur yang terakhir ini merupakan tradisi yang sudah membudaya dalam warga Nahdlatul Ulama.¹³ Seperti adanya lailitul ijtima'.

B. Aktifitas Politiknya.

Sesuai dengan suktamar Palembang setelah Nshdlatul Ulama keluar dari Masyumi maka ia membentuk dirinya menjadi partai politik yang mandiri. Sebagai partai politik yang mandiri ia harus memperjuangkan cita - cita partai. Dalam mewujudkan cita-cita partai, pada hakikatnya struktur organisasi yang sudah ada seperti syuriyah, tanfidiyah dan musytasyar masih dipertahankan hanya ditambah dewan partai.

Adapun fungsi dari kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mustasyar, ia berfungsi sebagai badan pembina, penasihat dan pembimbing kegiatan organisasi.
 2. Syuriyah, ia berfungsi sebagai badan yang menentukan organisasi.
 3. Tanfidiyah sebagai badan pelaksana atau eksekutif.¹⁴

¹²Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam Dan Masalah Koneks,
raan, LP3S, Jakarta, Cet I, Hal. 107-108.

¹³ Wawancara dengan Hasyim Latief di Kantor Wahyah NU Jatim, tanggal 5 Maret 1988.

Chairul Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Pujatayu, Sala, cet I, 1985, hal. 69-70.

4. Dewan partai, ia sebagai dewan legislatif.¹⁵

Dari uraian di atas dapatlah diketahui fungsi masing-masing kelompok dengan jelas tetapi kekuasaan yang tertinggi adalah kelompok syuriyah.

Dalam menguraikan aktifitas politik Nahdlatul Ulama, untuk lebih mudahnya dapat dibagi menjadi 4 periode yaitu : Pertama, dari tahun 1952 - 1955 mencari popularitasnya dalam berpolitik sebagai partai yang mandirix hingga pemilu. Kedua, dari 1955 - 1960 masa untuk mengejar kemenangan politik dalam sidang dewan konstituante, dalam mewujudkan negara yang berdasar Islam. Ketiga, dari tahun 1960 - 1965 masa-masa untuk menangkis perkembangan komunis, dan keempat, dari 1965 - 1971 masa untuk mengisi pembangunan.

a. Aktifitas politik Nahdlatul Ulama tahun 1952 - 1955.

Setelah Nahdlatul Ulama memisahkan diri dari partai Islam Masyumi (1952), berarti secara resmi ia berubah menjadi partai politik yang mandiri. Hal ini memungkinkan partai Nasional Indonesia (PNI) berkoalisi (kerjasama) dengan Nahdlatul Ulama dan dibantu oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) guna menggantikan koalisi yang lama yaitu koalisi PNI, Masyumi dan PSI (Partai Sosial Indoensia) yang tidak bertahan lama. Ini terjadi dalam kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI) di tahun 1953.¹⁶¹ Langkah awal ini - lah yang mulai mengenalkan ketenaran pada diri par - tai Nahdlatul Ulama sebagai partai yang mandiri.

Jika hasil pemilihan umum yang pertama bisa digunakan sebagai salah satu ukuran, maka ia

¹⁵ Drs. Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, Cet I, 1985, hal. 116.

¹⁶ B.J. Boland, Pergumulan Islam Di Indonesia, PT Grafitti Perss, Jakarta, Cet I, 1985, hal. 77.

jelas menunjukkan keberhasilan pola kerja sama Nahdlatul Ulama dengan partai Nasional Indonesia. Karena dari empat partai besar yang dihasilkannya ada tiga partai yang merupakan partai-partai pendukung koalisi itutialah partai Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia; sedangkan dari kekuatan-kekuatan yang lain seperti PSI, Parkindo, Partai Katholik dan lain-lainnya hanya Masyumi yang berhasil keluar sebagai partai besar. Keempat partai besar ini bersama-sama berhasil memperoleh 198 buah kursi dari semua kursi DPRS yang diperebutkan (257 buah), sedangkan kalau (PHI, NU, dan PKI) pendukung koalisi PHI-NU saja yang dihitung maka mereka disamping menangkap 141 kursi masih memperoleh mayoritas dalam DPRS baru hasil Pemilu pertama 1955.¹⁷ Kalau boleh dikatakan, bila mereka mu, koalisi PHI-NU dengan ayahah akan bisa dilestarikan.

Maka kampanye selama ini serta gambaran-gambaran hasil pemilihan umum itu sendiri telah menimbulkan suasana lain, suasana yang meburuk kedalam hubungan ketiga partai pendukung pola koalisi PRI-HU. Kampanye pemilihan umum sebagai media merebut suara pemilih telah membentuk partai-partai politik yang bersaing untuk memperjelas ideologi sekaligus mengangkat kepopuleran mereka berhadapan dengan partai-partai yang lain. Di sini diambil sebagai contoh adalah Nahdlatul Ulama. Sebagai partai Islam kampanye NU ditujukan terutama pada golongan santri, yang secara tradisional sudah terikat erat dengan para kyai yang kebanyakan menjadi tokoh NU. Hal itu berarti memperjelas perjuangan mereka untuk memenangkan ideologi Islam oleh NU dan sekaligus memperlihatkan sikap politik menentang komunis, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Nasyumi

¹⁷ Daniel Dhakedae, Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 183.

selama ini.¹⁸ Dengan makin besarnya solidaritas dan kesadaran berpolitik di kalangan Nahdlatul Ulama, yang memungkinkan kesuksesannya dalam pemilihan umum tahun 1955 itu, yaitu dengan menaikkan jumlah kursinya dari jatah 8 kursi pada DPRS meningkat menjadi 45 kursi dalam perolehan pemilihan umum 1955¹⁹.

Selain dari pada itu, dapat dikatakan bahwa kesuksesan partai Nahdlatul Ulama dalam pemilu 1955 karena sikap yang secara toleran diperlihatkan dalam pembebasan keempat madzhab fiqih. Bagi banyak pemilih secara emosional Nahdlatul Ulama dipandang sebagai partai Islam yang sesungguhnya, dengan para tokoh yang dapat mereka percayai untuk memelihara asas-asas Islam secara utuh, seperti KH. Hasyim Asy'ari dari Jombang, KH. Abd. Wahab Hasbullah dari Surabaya, KH. Mahfudz Shiddiq dari Jember dan KH. Maksum dari Lasem. Di sini terbukti secara nyata banyak dari para pemimpin ini yang merupakan guru dari para pemilih (dan kebetulan para pemimpin ini banyak yang memangku pondok pesantren), karena itu akan mengikuti para guru sebagai muridnya atau akan mengikuti para kyai sebagai santrinya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa partai Nahdlatul Ulama dalam menjalankan aktifitas politiknya antara tahun 1952 sampai 1955 pada pokoknya untuk meraih (semaximal mungkin) kemenangan dalam pemilihan umum 1955. Adapun caranya dengan mewujudkan banyak pesantren yang terus bertambah dan mendoktrin warganya untuk anti komunis.

3

¹⁸ Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, Cet.V, 1986, hal.33.

¹⁹ Saifuddin Zuhri, Op.cit., hal. 135.

b. Aktifitas politik Nahdlatul Ulama tahun 1955-1960

Sebagai partai politik prestasi Nahdlatul Ulama sejak masa demokrasi liberal perlu diperhitungkan, sebab partai ini ikut menentukan perjalanan negara Republik Indonesia. Pada masa deakrasi terpimpin partai ini dapat terhindar dari politik peabebaran partai oleh pemerintah, karena Nahdlatul Ulama nene- rima konsepsi pemerintah yaitu " demokrasinya Sockar no yang menghasilkan konsep kembali ke UUD 1945(1959 -1960).

Sejak keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi seakan-akan hubungan di antara keduanya putus begitu saja. Akan tetapi ketika menghadapi suatu persoalan kadang-kadang juga senyatu. Hal ini seperti yang diperlihatkannya di tahun 1956 pada sidang dewan konstituante. Pada saat itu kedua (Nahdlatul Ulama-Masyumi) sedang menghadapi partai-partai non Islam, dan yang anti Islam, yang telah bergabung kedalam suatu kelompok Pancasila, maka kedua partai Islam tersebut membentuk suatu front bersama.²⁰

Pada tanggal 2 Februari 1957 presiden Soekarno berpidato yang intinya menjelaskan " konsepsinya untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia " yakni demokrasi terpimpin merupakan langkah yang akan ditempuhnya. Bagi Kahdlatul Ulama konsep ini akhirnya diterimanya meskipun pada awalnya partai ini menentang ikut sertaanya partai komunis Indonesia duduk dalam kabinet gotong royong. Masih di tahun ini pula, pada bulan April 1957 terbentuklah kabinet Sjufanda. Kabinet ini anggotanya-anggotanya sebagian besar terdiri dari partai nasional Indonesia dan par-

²⁰ B.J. Boland, Op. cit. hal. 95.

tai Nahdlatul Ulama, sedangkan partai Komunis Indonesia hanya mendukung saja. Duduknya Nahdlatul Ulama dalam kabinet Djuanda, menyebabkan bertambahnya pengikut baru pada partai ini serta memperbesar perpecahan dengan Masyumi.²¹

Beberapa bulan sebelum terjadinya " Dekrit Presiden " tanggal 5 Juli 1959 , Nahdlatul Ulama melalui tokoh-tokohnya, seperti : H. Achmad Syaichu, K.H. Saifuddin Zuhri, H. Zainul Arifin dan K.H. Masykur selalu menentang ide Soekarno dalam masalah dasar negara dan UUD. Ide Soekarno itu adalah untuk menambahkan piagam Jakarta kedalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghilangkan tujuh kata yang sangat prinsipil menurut partai Nahdlatul Ulama khususnya dan partai Islam yang lain pada umumnya. Sedangkan partai Nahdlatul Ulama melalui tokoh-tokohnya tersebut menghendaki untuk menyisipkan tujuh kata seperti yang ada pada rumusan piagam Jakarta yang asli, yaitu k " kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi para peseluknya ",²² baik didalam pembukaan maupun dalam pasal 29 dari pada undang-undang dasar 1945. Dengan berbagai argumentasi yang diajukan oleh wakil-wakil Nahdlatul Ulama untuk meyakinkan presiden supaya mau menyelamatkan tujuh kata tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun juga tidak berhasil. Dengan tidak berhasilnya kehendak Nahdlatul Ulama ini, maka apa yang menjadi harapannya gagal, dan sekaligus ia harus mengakui akan kekalahannya. Ini terjadi di saat dekrit presiden pada 5 Juli 1959. Walaupun demikian warga Nahdlatul Ulama tetap konsekwen, artinya warga NU mentsati dan mengamalkan isi

²¹ Ibid., hal. 91-93.

22 Ibid., hal. 105.

dekret presiden itu. Dan pada tahun 1960 Nahdlatul Ulama dapat selamat dari pembubaran partai, karena ia mau menerima konsep demokrasi terpimpin, dan sebagai konsekwensinya yang lain, partai ini harus menyerah dalam Nasakom.

c. Aktifitas politik Nahdlatul Ulama 1960-1965.

Pada tahun 1960, partai Nahdlatul Ulama menyeburkan diri kedalam konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom. Ini bukan berarti Nahdlatul Ulama seratus-persen mau menyetujui konsep tersebut di atas, tapi sekiranya ini benar bahwa peristiwa tersebut hanyalah merupakan politik semata. Sebab keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam Nasakom ini untuk mencegah gaga-san Soekarno²³ yang memberi kesempatan pada PKI dalam mengembangkan sayapnya- dan atau memang dituntut keadaan yang demikian. Sebenarnya bagi Nahdlatul Ulama dirasakan semakin sulit untuk kerjasama dengan partai Nasional Indonesia (PNI) serta partai Komunis Indonesia (PKI), karena ideologi partai yang terakhir ini tidak bisa diterimanya. Sejak saat itulah hubungan NU-PNI semakin memburuk, lebih-lebih hubungan NU dengan PKI.

Dalam tahun 1964, kebencian partai Nahdlatul Ulama mencapai puncaknya yaitu ketika PKI melancarkan aksi secara kasar, keras dan radikal. PKI melancarkan gerakan yang terkenal dengan "aksi sepihak". Aksi ini adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kader-kader PKI, terutama aktifis-aktifis organisasi tani BTI, mereka secara sepihak memaksakan pembagian tanah dan hasil pertanian kepada petani-petani di beberapa desa, khususnya di Jawa.²⁴

²³ M. Oesman Mansoor, Peranan NU Dalam Pengembangan Islam Dan Membaikinya Tanah Air, Pn. NU Kodja Surabaya, 1980, hal. 175.

24. Choirul Anam, Op. cit., hal. 238.

Dengan aksinya ini, mungkin sekali PKI mengharapkan kekuasaannya dapat terjangkau; baik dari kalangan masyarakat bawah maupun dikalangan elite politik atas.

Ulah PKI itu telah menyebabkan partai Nahdlatul Ulama, semakin merasakan akibat buruk dari aksi sepihak itu. Sehingga perlu mengadakan perlawanan keras dan menghadangnya dengan kekuatan maksimal²⁵. Lebih-lebih sejak leluh Nahdlatul Ulama curiga dan benci terhadap tingkah laku politik PKI itu, ketika Nahdlatul Ulama sudah selesai mengadakan konsolidasi (memperkuat keduakan) kаддала secerca matang. Sebagai perimbangan kekuatan PKI, berisian Nahdlatul Ulama terdiri dari Pertenu sebagai imbangan dari BTI; Lebumi sebagai dari Lekre; Sarbumisi sebagai imbangan Bobsi; Patayat sebagai imbangan dari Gerwani; dan masih banyak lagi berisian NU seperti IPPHU, IPNU, PMII dan khususnya pemuda Ansor beserta Bansernya, telah siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk dari akibat yang ditimbulkan aksi sepihak PKI.

Kecurigaan dan kebencian Nahdlatul Ulama sebagai partai Islam terhadap PKI mencapai puncaknya pada tahun 1965 dengan timbulnya peristiwa G 30 S/PKI. Nahdlatul Ulama bersama ABRI terutama Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayor Jendral Soeharto Penglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) dan organisasi massa yang lain waktu itu dapat menutup Gestapo/PKI. Jendral Nasution dapat diselamatkan dari penculikan dan pembunuhan pada waktu pemberontakan tersebut. Dengan demikian partai Nahdlatul Ulama berhasil melalui masa-masa sulit sebagai

²⁵Alfian, Op.cit., hal. 45.

bat Gestapu/PKI dengan goncangan-gontangan sedikit, dan para pemimpin Nahdlatul Ulama yang aktif dalam demokrasi terpimpin berhasil mempertahankan dukungan para pengikutnya di pesantren-pesantren yang tersebut di pedesaan-pedesaan Jawa Timur dan Jawa Tengah.

d. Aktifitas Politik Nahdlatul Ulama 1965 - 1971.

Sejak awal tahun 1969-an merupakan masa krisis yang dialami partai Nahdlatul Ulama hingga tahun 1965 dan ini sudah terlewati dengan selamat. Karena situasi yang tidak memungkinkan, maka jarak antara pemilu pertama dengan kedua sangat jauh, yakni dari tahun 1955 - tahun 1971. Namun bukan berarti Nahdlatul Ulama selama 16 tahun itu bebas dari persoalan politik. Sebab selama itu tidak sedikit persoalan-persoalan yang telah dapat diselesaikan oleh negara dan partai ini pun tidak ketinggalan untuk turut serta. Terutama jasanya yang telah ikut menumpas G.30.S / PKI, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia mempercayai dan menjadikan posisi partai ini membumbung tinggi hingga menjelang tahun 1971.²⁶

Dalam antara tahun 1966-1967 terdapat dualisme kepemimpinan nasional, yaitu di satu pihak presiden Soekarno masih tetap aktif, sedangkan di pihak lain adanya Jendral Soeharto yang semakin populer. Kepopuleran Soeharto boleh jadi berkat prestasinya menumbas pemberontakan G.30.S / PKI dalam waktu yang sangat relatif singkat, serta melaksanakan dengan jelas usaha-usaha stabilitas politik dan ekonomi berdasarkan Supersemar (surat perintah sebelas maret).²⁷

26 Slamet Efendi Yusuf, Dinamika Kaum Santri, CV Rajewali, Jakarta, Cet I, 1983, hal. 50-51.

²⁷ Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia VI, hal. 415.

Pada awal tahun 1967, Nahdlatul Ulama di DPR-Gotong Royong mengajukan resolusi yang meminta agar segera diselenggarakan sidang istimewa MPRS. Resolusi ini disusul oleh resolusi berikutnya dibawah pimpinan H. Djemaluddin Malik (NU), pada dasarnya meminta agar sidang istimewa MPRS ini mengangkat Jendral Soeharto menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia menggantikan presiden yang lama Ir. Soekarno. Dengan pengangkatan Jendral Soeharto sebagai pejabat presiden dalam jangka waktu 1967-1971 itu, maka lenyaplah dualisme kepemimpinan nasional tersebut. Ini merupakan awal penataan kepemimpinan Orde Baru.

Pada awal tahun 1968 posisi Nahdlatul Ulama mulai terjepit, padahal kalau kita tengok ke belakang, artinya di awal timbulnya orde baru, Nahdlatul Ulama adalah merupakan partai politik yang memegang peranan paling besar. Karena di tahun ini (1968) sudah timbul gejala-gejala politik yang kurang sehat. Salah satu sebabnya ialah penundaan jadwal pemilu yang mestinya harus dilaksanakan tahun 1968, namun ditunda sampai tahun 1973. Hal ini berkat penolakan kelompok kecil yang disebut Subahan ZE yang akhirnya menghasilkan penundaan pemilu tersebut sampai tahun 1971.²⁸ Sudah barang tentu ini juga mengakibatkan perubahan Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang pemilu menjadi Tap MPRS No.XLII/MPRS/1968, yang isinya mengubah jadwal pemilu dari tahun 1968 menjadi tahun 1971. Dalam masalah ini juga ditegaskan bahwa anggota DPR dan DPRD terdiri dari Golkar dan golongan politik.

Nasalah lain yang menyebabkan necerotnya partai-partai Islam, khususnya Nahdlatul Ulama ialah

²⁸ Choirul Anam, Op. cit. hal. 257.

kesungkinan besar karena adanya Undang-Undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan DPR dan DPRD yang telah ditetapkan oleh presiden, dengan di-dominesi oleh ABRI dan Golkar. Dan sebagai akibat logis adanya Tap tersebut adalah sukaranya golongan sipil untuk menerobos jaringan-jaringan tersebut ; apa lagi ditunjang adanya keharusan " monoloyalitas " bagi Golkar. Maka nyaris kekuatan sosial politik, terutama Nahdlatul Ulama semakin tidak menentu eksistensinya.

Pada tahun 1970 sampai awal tahun 1971 merupakan masa-masa persiapan untuk menghadapi pemilu yang kedua selama Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Masa ini bagi Nahdlatul Ulama juga merupakan masa-masa persiapan guna meraih kemenangan dalam pemilu tersebut. Dan sudah barang tentu ikut sertanya Nahdlatul Ulama sebagai kontestan pemilu 1971 adalah merupakan usahanya dalam mengisi pembangunan yang sedang digalakkan pada saat itu. Dengan desikian Nahdlatul Ulama akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkannya, sebab dengan kemenangan dalam pemilu, ini berarti akan lebih mudah untuk dapat menggalakkan segala aktifitas pembangunan sesuai dengan program Nahdlatul Ulama tentunya.

Meskipun usaha telah digalakkan seaksimal mungkin, namun ternyata lawan politik yang dihadapi terlalu tangguh, maka tak ayal lagi kalau Nahdlatul Ulama hanya cukup dapat mempertahankan keberhasilan yang dicapainya dalam pemilu 1955 dan boleh dikata ada sedikit peningkatan yaitu dari 45 kursi menjadi 58 kursi. Pengalaman keberhasilan yang meski dirasa kurang memuaskan tersebut bukanlah menjadi tolok ukur

²⁹Ibid. bal. 258.

yang lebih penting adalah bahwa warga Nahdlatul Ulama mampu menunjukkan eksistensinya sekaligus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan aturannya.

C. Situasi Hubungan Partai Nahdlatul Ulama Dengan Partai Politik Yang Lain (1952-1971).

Nahdlatul Ulama merupakan partai politik yang besar; perjuangannya baik dibidang politik maupun kemasyarakatan telah mampu mempengaruhi kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Sebenarnya perjuangannya tersebut tidaklah selalu berjalan mulus, tetapi selalu jatuhbangun. Untuk lebih jelasnya dalam hubungan antara partai Nahdlatul Ulama dengan partai politik yang lain dapatlah diuraikan sebagai berikut :

I. Hubungan Partai Nahdlatul Ulama dengan partai politik yang lain (1952-1955).

Antara tahun 1952-1955 di Indonesia merupakan periode menjelang pemilihan umum yang pertama .Menurut katagori Boland antara tahun 1950-1955 merupakan masa atau periode pertentangan di antara partai-partai.^{30K}

Kemungkinan besar istilah ini lebih mendekati kebenaran jika disebut periode untuk memantapkan identitas partai. Sebab di dalam masa antara tahun 1952-1955 (sebelum dilaksanakan pemilihan umum I oleh pemerintah RI) semua partai bergelut untuk mencari corak yang cocok bagi partainya masing-masing.

contoh : 1. Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan ciri khasnya nasional.

2. Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ciri khasnya Komunis.

3. Masyumi (sebelum NU keluar) merupakan partai

30 B.J. Boland, Op. cit, hal. 50

satu-satunya yang bercirikan Islam. Tetapi setelah Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi ciri keislaman satu-satunya bagi partai Masyumi tersebut hilang.

Adepun hubungan partai Nahdlatul Ulama dengan partai lain pada periode(1952-1955) boleh dikatakan belum menentu sebab sesekali waktu pernahberkoalisi dengan PNI dan sesekali waktu kontra (1953), begitu juga masalah kwalitas, kwantitas wappun posisi partai-partai belum menentu. Untuk menentukan masalah-masalah tersebut antara lain dengan jalan mempengaruhi masyarakat guna mendapat simpati mereka untuk menentangkan pemilu. Sedangkan di Indonesia sendiri sejak bangsa Indonesia merdeka belum pernah mengadakan pemilu sampai pada tahun 1955. Pemilu yang pertama ini baru dilangsungkan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih dewan perwakilan rakyat (DPR) dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih dewan konstituante.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan partai Nahdlatul Ulama dengan partai politik yang lain belum benar-benar tentu, karena masing-masing masih mencari identitas diri.

2. Hubungan Partai Nahdlatul Ulama Dengan Partai Politik Yang Lain (1955-1959).

Situasi politik Indonesia pada tahun 1955- 1959 dapat dikatakan sebagai kehidupan politik yang berkembang sangat ruwet dan kabur. Memang pada masa ini masih banyak konflik antar partai dan pertentangan ideologis yang berlebihan³¹. Pertentangan ini berkisar pada masalah perumusan dasar dan Undang Undang Dasar negara.

31 Ibis, vol. 89.

Dalam usaha perumusan ini pada dasarnya ada tiga kelompok besar yang saling bertentangan, terutama disaat berlangsungnya sidang dewan konstituante. Ketiga kelompok itu ialah :

- a. Kelompok pertama, merupakan kelompok yang menghendaki negara Indonesia berdasarkan ajaran Islam. Ini seperti yang dikehendaki oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
 - b. Kelompok kedua, ini merupakan kelompok yang menghendaki dasar Pancasila dan menghendaki negara nasional. Kelompok ini seperti yang dikehendaki oleh Partai Nasional Indonesia.
 - c. Kelompok yang ketiga atau yang terakhir adalah kelompok yang menghendaki dasar Sosialis-Marxis. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu contoh kelompok yang menghendaki dasar Sosial - Marxis ini.³²

Disinilah terjadi perbedaan dan pertentangan paham, sebab bagaimanapun juga masalah ideologi adalah merupakan masalah yang bersifat sangat prinsip dalam mendasari setiap tindakan manusia.³³ Oleh karena itu dimasa ini (1955-1959) hubungan Partai Nahdlatul Ulama dengan Partai politik yang lain berkembang sangat tegang; terkecuali hubungannya dengan Partai-partai yang seideologi (Islam) karena mereka saling mempertahankan konsep dan ideologi masing-masing, terutama dalam masalah perumusan dasar dan undang-undang dasar negara.

3. Hubungan Partai Nahdlatul Ulama dengan partai Politik yang lain tahun 1960 - 1965.

Di zaman merdeka potensi Islam dan umatnya besar jumlahnya,³⁴ dan tidak dapat disangkal lagi bahwa organi-

³² Alfian, Op.Cit., hal. 100.

³³ Ibid. hal. 73-74

³⁴ Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, Cet. III, 1985, hal. vxiii

sasi Islamiah, merupakan organisasi yang paling menentang terhadap partai Komunis, terutama Nahdlatul Ulama dan Nasyuni (sebelum bubar). Hal ini bukan hanya menjelang peristiwa G 30 S/PKI saja, melainkan sejak "peristiwa Madiun"; itulah sebabnya Nahdlatul Ulama selalu menjaga setiap kesungkinan yang akan terjadi. Akhirnya kebencian NU sampai pada puncaknya ketika PKI melancarkan aksi-aksinya secara kasar, keras dan radikal. Di tahun 1964 PKI melancarkan gerakan yang terkenal dengan "Aksi Sepihak", yaitu tindakan yang di jalankan oleh kader-kader PKI terutama aktifis-aktifis organisasi tani STI (Barisan Tani Indonesia). Secara sepihak mereka memaksakan pembagian tanah dan hasil pertanian kepada petani-petani di desa-desa khususnya di P. Java.³⁵ Namun begitu NU juga dapat mengimbangi aksi tersebut, dengan cara: 1. Mempertinggi disiplin organisasi; 2. Mempertinggi kewaspadaan; 3. Mempertinggi kesetiaan kepada partai; 4. Mempertinggi penggunaan taktik dan keuletan berpolitik; 5. Mempertinggi kemampuan fisik (kekebalan atau penggalungan) dan kemampuan mental anggota;³⁶ dan 6. Memprakarsai terbentuknya solidaritas Islam serta menggalang persatuan di kalangan partai maupun organisasi yang ada, sehingga lahirlah "Front Pancasila" pada 26 Oktober 1965.³⁷

Front Pancasila ini mempunyai tujuan untuk mempertahankan dasar negara Pancasila, sudah barang tentu akan menghancurkan gelengen yang anti pada dasar negara yaitu PKI. Aksi pengganyangan Gestapu yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama beserta partai politik lain terhadap gelengen yang anti Pancasila akhirnya berhasil.³⁸

³⁵ Choirul Anam, Op.cit, hal. 238.

³⁶ Choirul Anam, loc.cit.

57 Marwati Djoened Poessponegoro dan Nugroho Noto-susanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, PR Balai Pustaka, Jakarta, Cet. IV, 1964, hal. 404.

³⁸ Slamet Effendy Yusuf, Op.cit, hal. 50.

Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa :

1. Hubungan Nahdlatul Ulama dengan PKI sulit dicapai ke-sepakaten dalam merumuskan suatu masalah bahkan sering bertengangan.
 2. Hubungan Nahdlatul Ulama dengan Partai Politik lainnya terasa menyatu dalam satu langkah dan tujuan, yaitu mempertahankan negara Indonesia dari rongrongan komunis sekali gus mempertahankan ideologi Pancasila.
 4. Hubungan Partai Nahdlatul Ulama dengan Partai Politik yang lain Tahun 1966-1968.

Meupertahankan ideologi Pancasila tidaklah mudah, karena mereka harus berhadapan dengan PKI yang waktu itu memiliki pengaruh yang luas. Untuk itu setelah program PKI dalam mengambil alih kekuasaan dapat digagalkan; maka sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Partai Nahdlatul Ulama beserta Partai Politik yang lain serta ormas yang ada yaitu :

- a. Untuk mempertahankan kemenangan yang telah dicapainya.
 - b. Ikut menciptakan stabilitas Politik.³⁹

Adapun cara yang ditempuh yaitu dengan memberhentikan presiden Soekarno dari jabatannya dan memilih/mengangkat Jendral Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia dalam masa jabatan antara tahun 1967-1971 melalui wakilnya yang duduk di DPR - MPR. Jadi jelaslah bahwa hubungan Partai Nahdlatul Ulama beserta Partai lain serta ormas yang ada masih terjalin kuat sebagai tindak lanjut dari kesenangan yang telah mereka capai bersama, terutama dari rongrongan komunis. Dengan demikian kedudukan orde baru dimasa ini (1966-1968) mengadi kokoh.

- #### **5. Hubungan Partai Nahdlatul Ulama dengan Partai Politik yang lain Tahun 1968-1971.**

39 Mujib Ridwan, Hasil Ceramah Periodik NU Ancap. Gubeng di Kertajaya, Surabaya, tanggal 126 Januari 1985.

Periode awal Orde Baru dimulai pada tahun 1968 sampai tahun 1971; yang di tandai adanya pemilihan umum (Pemilu⁴⁰). Adanya pemilu, membuktikan terjadinya perkembangan politik. Perkembangan itu dimaksudkan untuk lebih mempertahankan cita-cita Orde Baru ialah Stabilitas Nasional. Sedangkan Orde Baru berpendapat sehubungan dengan kepartaihan pada waktu itu bahwa ketidakstabilan yang terjadi selama Orde Léma karena terlalu banyak partai; sistem banyak partai inilah yang memberikan peluang terjadinya persaingan dan perubutan kekuasaan yang tidak sehat⁴⁰, sehingga menonjolkan program yang sebenarnya didahulukan. Oleh karena hal tersebut di atas perlu adanya penyederhanaan partai.

Adanya pde penyederhanaan partai ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966, yaitu sejak MPRS menges-kan kepada pemerintah dan DPR-GR untuk bersama-sama acu-buat undang-undang yang mengatur kepartaian,keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan. Pada tahun 1968 Presiden menurunkan SK-nya yaitu SK Presiden No.70 tahun 1968 yang isinya tentang berdirinya "Partai Muslimin Indonesia". Sedangkan undang-undang pemilu baru berhasil disusun pada tahun 1969 yang intinya menetapkan ke-kukten politik Indonesia yang ikut bertanding pada pemilu 1971 ada sepuluh⁴¹, yaitu:

1. Partai Kathelik
 2. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
 3. Nahdlatul Ulama (NU)
 4. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
 5. Golongan Karya (Golkar)
 6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
 7. Murba
 8. Partai Nasional Indonesia (PNI)
 9. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

⁴⁰ Choirul Anam, Op.cit.hal. 244.

⁴¹ Unaidi Radi, Strategi PIP, Integrita Press, Jakarta, 1984, hal. 52-54.

10. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Dari susunan nama-nama partai yang ikut pemilu tahun 1971 tersebut di atas dapat diketahui bahwa hubungan Nahdlatul Ulama dengan partai yang lain masih tetap berjalan dengan baik karena sama-sama diberi hak untuk merebutkan kursi DPR. Dengan demikian hubungan Nahdlatul Ulama dengan partai politik yang lain di masa ini (1968 - 1971) sudah tidak lagi mementingkan masalah ideologi, tetapi mereka bersama-sama dituntut untuk mengisi Orde Baru dengan membangun di semua sektor yang rusak akibat Orde Lama.

Itu semua yang mendasari sikap hubungan politik NU dengan partai politik yang lain dari tahun 1952 sampai menjelang pemilu pertama di masa orde baru tahun 1971, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Di masa orde lama, hubungan mereka terlihat dalam membela dan mempertahankan dasar negara.
- b. Di masa orde baru, mereka secara bersama-sama mengisi pembangunan.

Agar lebih jelas untuk mengetahui sepak terjang Nahdlatul Ulam berpolitik, dapat dilihat dalam bab berikutnya, bab III dimana diuraikan tentang fusi Nahdlatul Ulama dalam partai persatuan pembangunan.